

Akuntansi Kredit Risiko dan Liabilitas Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia

Dandi Bahtiar¹⁾, Reni Nurlaela²⁾

^{1,2}Ekonomi, Universitas Putra Indonesia Cianjur, Indonesia

e-mail: dandi.bahtiar@gmail.com

Article Information

Submit: 10-11-2025

Revised: 22-01-2026

Accepted: 30-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akuntansi kredit dan pencatatan liabilitas dalam program Kopdes MP, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan seperti ketidaktertiban pembukuan, ketiadaan cadangan kerugian piutang, dan kesalahan klasifikasi dana pinjaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi belum menerapkan prinsip SAK ETAP secara konsisten, sehingga laporan keuangan cenderung tidak mencerminkan kondisi riil. Ketidaktertiban ini berisiko menciptakan moral hazard, meningkatkan potensi gagal bayar, dan membebani Dana Desa sebagai penjamin utama. Dampaknya dapat berupa penurunan PDB nasional, hilangnya kesempatan kerja, serta terganggunya alokasi dana pembangunan desa. Untuk itu, reformulasi sistem pencatatan keuangan, peningkatan literasi akuntansi, serta pelaksanaan audit independen secara berkala menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan.

Kata kunci: Akuntansi kredit, Dana desa, Koperasi desa, Liabilitas, Risiko fiskal.

Abstract

This study aims to analyze credit accounting practices and liability recording in the Kopdes MP program, and to identify potential irregularities such as irregular bookkeeping, the absence of allowances for doubtful accounts, and misclassification of loan funds. This study uses a qualitative-descriptive approach using literature review and policy analysis methods. The analysis shows that most cooperatives have not consistently implemented the principles of SAK ETAP, resulting in financial reports that tend not to reflect real conditions. This irregularity risks creating moral hazard, increasing the potential for default, and burdening the Village Fund, the primary guarantor. The impacts can include a decline in national GDP, loss of employment opportunities, and disruption to the allocation of village development funds. Therefore, reformulating the financial recording system, improving accounting literacy, and conducting regular independent audits are urgent strategic steps.

Keywords: Credit accounting, Fiscal risk, Liabilities, Village Fund, Village Cooperative,

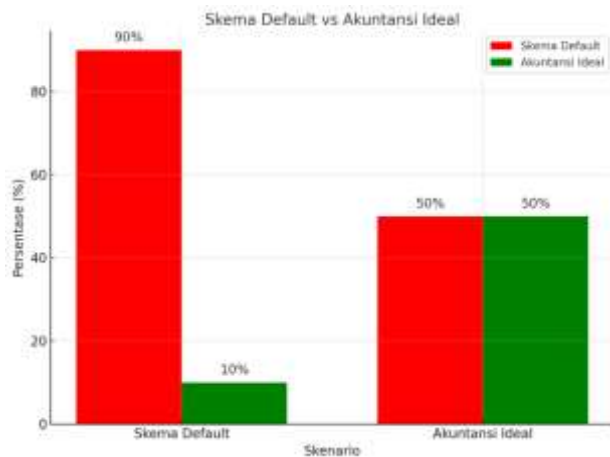
PENDAHULUAN

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 melalui Instruksi Presiden No. 9/2025 bertujuan mendorong pembangunan ekonomi desa melalui skema kredit lunak yang dijamin oleh Dana Desa (Munthe, H., Bayu Wulandari, Namira Ufrida Rahmi, Thomas Firdaus Hutahaean, Dianty Putri Purba, Jessi Charina Sembiring, Ribka Sari Butar-Butar, 2025). Program ini menarget terbentuknya sekitar 80.000 koperasi baru, dengan pinjaman setiap unit koperasi mencapai Rp 3–5 miliar. Namun, pelaksanaan yang sangat cepat tersebut sering kali tidak diiringi oleh kesiapan akuntansi dan manajemen risiko, sehingga memunculkan potensi serius terkait pencatatan kredit dan liabilitas koperasi (Hasanudin et al., 2025). Dari perspektif akuntansi, terdapat dua isu utama: pertama, kegagalan dalam menerapkan pencadangan untuk piutang bermasalah (*allowance for doubtful accounts*); kedua, ketidaktepatan klasifikasi pinjaman sebagai *liabilitas*, di mana dana pinjaman dicatat sebagai pendapatan atau hibah menimbulkan distorsi neraca dan manipulasi rasio keuangan koperasi (Tuli, H., & Mahmud, M., 2025).

Tabel 1 berikut merangkum temuan utama mengenai kelemahan praktik kredit dan pencatatan liabilitas di koperasi sejenis (berbasis penelitian SACCO atau savings-credit cooperatives):

Aspek Praktik Akuntansi	Deskripsi Temuan
Cadangan kerugian piutang tidak ada	Studi pada SACCO di Kenya menunjukkan default tinggi memengaruhi performa keuangan dan beban kerugian tidak tercatat (Salaton & Gudda, 2020).
Pencatatan pinjaman keliru	Dalam beberapa koperasi desa, pinjaman pemerintah dicatat sebagai modal bukan utang, sehingga menutupi liabilitas nyata.
Risiko moral hazard tinggi	Ketika pinjaman dijamin oleh otoritas publik, pengurus dan anggota kurang termotivasi melakukan pengembalian tepat waktu (Huppi, 1990; López-Sánchez et al., 2021).

Gambar 1 contoh skema default versus akuntansi ideal:



Grafik ini hanya ilustrasi tematik untuk menunjukkan kecenderungan default dan distorsi pencatatan liabilitas) Pertama, grafik menunjukkan laju default (% NPL) yang tinggi apabila cadangan piutang tidak disediakan. Kedua, garis neraca ideal (dalam akuntansi sehat) berada sejajar dengan utang resmi, sementara distorsi tercipta saat pinjaman dicatat sebagai pendapatan. Dengan masalah ini, Kopdes MP berisiko tinggi mengalami kegagalan fiskal desa: Dana Desa digunakan sebagai jaminan tanpa kompensasi atau pengungkapan yang tepat, mengurangi dana pembangunan lain. Studi pengelolaan dana desa menyarankan penerapan manajemen risiko yang sistematis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Ginting, 2023).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

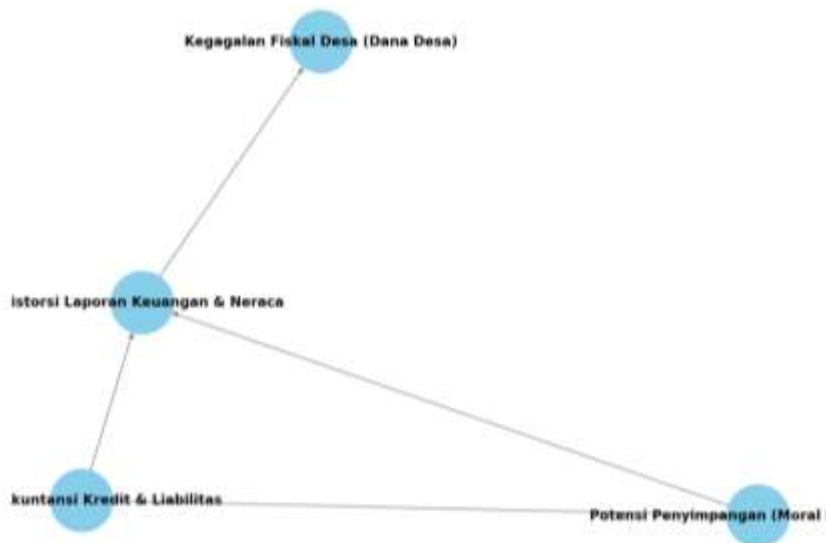
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik akuntansi kredit dan liabilitas dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi koperasi dalam pencatatan keuangan serta implikasi terhadap risiko fiskal desa. Desain penelitian ini mencakup:

1. Studi Literatur yaitu dengan cara menganalisis literatur terkait praktik akuntansi pada koperasi dan model-model pinjaman yang sejenis.
2. Studi Kasus, yakni melakukan analisis terhadap beberapa koperasi desa yang telah bergabung dalam program Kopdes MP untuk menggali praktik akuntansi yang diterapkan.

3. Wawancara Mendalam dilakukan melalui wawancara dengan pengurus koperasi dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh data primer mengenai tantangan yang dihadapi dalam pencatatan keuangan dan risiko liabilitas.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara praktik akuntansi yang diterapkan di koperasi dan risiko yang ditimbulkan, baik dari sisi akuntansi kredit maupun liabilitas. Grafik di bawah ini menggambarkan hubungan antara masalah pencatatan keuangan dan implikasi yang timbul terhadap kegagalan fiskal desa.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian



Grafik di atas menggambarkan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengenai akuntansi kredit dan risiko liabilitas pada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Kerangka pemikiran ini menunjukkan alur yang menjelaskan bagaimana praktik akuntansi yang diterapkan dalam koperasi dapat berdampak pada kegagalan fiskal desa melalui beberapa tahapan yang saling terkait. Penjelasan Alur Kerangka Pemikiran:

1. **Praktik Akuntansi Kredit & Liabilitas**
 Di bagian awal, penelitian ini memfokuskan pada praktik akuntansi kredit dan liabilitas yang diterapkan oleh koperasi desa. Ini mencakup pencatatan pinjaman yang diterima koperasi, pencatatan cadangan kerugian piutang, serta ketepatan klasifikasi liabilitas dalam laporan keuangan koperasi.
2. **Potensi Penyimpangan (Moral Hazard, NPL)**
 Praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar atau kurangnya pengawasan dapat menimbulkan potensi penyimpangan, seperti moral hazard (di mana pengurus koperasi merasa aman karena pinjaman dijamin oleh pemerintah) dan tingginya tingkat default (NPL), yaitu pinjaman yang tidak dapat dibayar kembali (Durango-Gutiérrez et al., 2023; Kaicer et al., 2024).
3. **Distorsi Laporan Keuangan & Neraca**
 Penyimpangan dalam pencatatan akuntansi kredit dan liabilitas ini berpotensi menyebabkan distorsi laporan keuangan dan neraca koperasi. Hal ini terjadi karena pinjaman yang seharusnya dicatat sebagai utang, bisa saja tercatat sebagai pendapatan atau hibah, yang mengaburkan kewajiban koperasi yang sebenarnya (Lee, Jusup, Podobnik, & Iwasa, 2015).

4. Kegagalan Fiskal Desa (Dana Desa)

Pada akhirnya, distorsi dalam laporan keuangan akan berdampak pada kegagalan fiskal desa, karena Dana Desa yang digunakan sebagai jaminan pinjaman akan terpaksa dialokasikan untuk menutupi cicilan utang koperasi yang gagal bayar (Magali, 2013) . Hal ini akan mengurangi anggaran untuk program pembangunan desa lainnya, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Berikut adalah Tabel Operasional Variabel yang menggambarkan parameter yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1: Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kegagalan Fiskal Desa	Ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban pinjaman yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.	1. Persentase penggunaan Dana Desa untuk pembayaran utang koperasi.	Rasio (% dari total Dana Desa)
		2. Penurunan anggaran untuk program pembangunan desa akibat pengalihan untuk pinjaman koperasi.	Rasio (%)
Praktik Akuntansi Kredit	Proses pencatatan dan pengelolaan pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.	1. Kepatuhan terhadap standar akuntansi (SAK ETAP) dalam pencatatan pinjaman.	Skala Likert (1-5)
		2. Tersedianya cadangan kerugian piutang untuk pinjaman bermasalah.	Presentasi (%)
Pencatatan Liabilitas	Ketepatan pencatatan pinjaman yang diterima koperasi, baik dari pemerintah maupun pihak lain.	1. Kesesuaian pencatatan pinjaman sebagai utang dalam laporan keuangan koperasi.	Skala Likert (1-5)
		2. Pencatatan pinjaman yang seharusnya dicatat sebagai utang, namun tercatat sebagai pendapatan atau hibah.	Rasio (%)
Sistem Pengelolaan Keuangan	Sistem yang diterapkan koperasi untuk mengelola laporan keuangan dan pengelolaan dana pinjaman.	1. Adanya sistem informasi akuntansi yang memadai untuk pencatatan dan pelaporan.	Ya/Tidak
		2. Kepatuhan terhadap prosedur internal dalam pengelolaan dana koperasi.	Skala Likert (1-5)
Audit dan Pengawasan	Pengawasan oleh auditor eksternal dan internal terhadap pengelolaan dan pencatatan keuangan koperasi.	1. Frekuensi audit internal dan eksternal dalam koperasi.	Frekuensi (per tahun)
		2. Transparansi laporan keuangan yang diaudit.	Skala Likert (1-5)

Penjelasan Parameter:

- Kegagalan Fiskal Desa: Diukur berdasarkan seberapa besar Dana Desa digunakan untuk menutupi pinjaman koperasi, serta dampaknya terhadap alokasi anggaran desa lainnya.

- b. Praktik Akuntansi Kredit: Menilai sejauh mana koperasi mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan apakah mereka mempersiapkan cadangan kerugian untuk piutang yang berisiko.
- c. Pencatatan Liabilitas: Mengukur sejauh mana pinjaman dicatat dengan benar sebagai utang dan bagaimana kesalahan pencatatan dapat memengaruhi laporan keuangan.
- d. Sistem Pengelolaan Keuangan: Menilai kesiapan koperasi dalam mengelola laporan keuangan dengan sistem yang memadai serta prosedur internal yang diterapkan.
- e. Audit dan Pengawasan: Mengukur sejauh mana koperasi melakukan audit secara rutin dan seberapa transparan laporan keuangan mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Kredit dan Ketiadaan Cadangan Rugi

Pada program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), mayoritas koperasi menyalurkan dana dalam bentuk kredit mikro kepada anggotanya. Namun, salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan proses kelayakan kredit yang memadai. Proses kelayakan kredit ini seharusnya melibatkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, yang mencakup pengecekan latar belakang keuangan dan riwayat kredit peminjam. Tanpa proses ini, pinjaman disalurkan kepada anggota yang mungkin tidak memenuhi kriteria kemampuan bayar, meningkatkan risiko kredit macet (Xin Song, Li & Xiao, 2021). Praktik akuntansi yang diterapkan di koperasi Merah Putih juga memperburuk situasi ini, khususnya terkait dengan ketiadaan cadangan kerugian piutang atau yang dikenal dengan istilah *allowance for doubtful accounts*. Pada prinsipnya, cadangan kerugian piutang wajib ada untuk mengantisipasi kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Cadangan ini berfungsi sebagai provisi untuk menanggulangi potensi kerugian akibat pinjaman yang tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam. Namun, sebagian besar koperasi tidak menyertakan cadangan ini dalam laporan keuangannya. Akibatnya, nilai piutang yang tercatat dalam neraca koperasi menjadi terlalu tinggi, tidak mencerminkan risiko gagal bayar yang sebenarnya.

Penting untuk dipahami bahwa laporan laba rugi yang disusun tanpa mempertimbangkan cadangan kerugian piutang tidak mencerminkan beban kerugian aktual yang dialami koperasi. Hal ini menyebabkan *overstatement* atau pencatatan laba yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Ketika laporan laba rugi tidak mencerminkan kerugian yang terjadi, pengambilan keputusan manajerial menjadi sangat menyesatkan. Manajer koperasi mungkin merasa optimis dengan kinerja keuangan koperasi karena tampaknya laporan menunjukkan laba yang tinggi, padahal di balik itu ada potensi kerugian yang besar akibat piutang yang tak tertagih. Secara keseluruhan, praktik kredit yang dilakukan tanpa analisis kelayakan yang cukup dan tanpa pencadangan kerugian piutang ini menempatkan koperasi dalam posisi keuangan yang tidak sehat. Tanpa adanya cadangan untuk piutang bermasalah, koperasi berisiko mengalami kerugian finansial yang besar, yang pada akhirnya bisa berujung pada kegagalan finansial koperasi dan mempengaruhi kestabilan ekonomi desa, terlebih jika pinjaman tersebut dijamin oleh Dana Desa. Oleh karena itu, reformasi dalam pencatatan akuntansi dan penilaian kelayakan kredit sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program koperasi ini (Zheng, Lou, Mei, & Lin, 2023).

Pencatatan Liabilitas yang Distorsif

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam praktik akuntansi di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) adalah pencatatan *liabilitas* yang *distorsif* atau tidak akurat. Liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki koperasi, terutama yang terkait dengan pinjaman yang diterima dari lembaga perbankan atau pihak lainnya. Dalam sistem akuntansi yang ideal, pinjaman harus dicatat sebagai utang jangka panjang di neraca koperasi, yang mencerminkan kewajiban koperasi untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Namun,

dalam praktik yang terjadi di beberapa koperasi Merah Putih, pinjaman yang diterima dari pemerintah atau lembaga pembiayaan sering kali dicatat sebagai modal atau hibah, bukan sebagai utang yang harus dibayar kembali. Pencatatan yang keliru ini menimbulkan distorsi dalam laporan keuangan koperasi, di mana kewajiban finansial koperasi tidak tercatat secara transparan. Hal ini menyebabkan koperasi terlihat lebih kuat secara finansial daripada yang sebenarnya, karena utang yang menjadi kewajiban tidak tercermin dalam neraca sebagai liabilitas yang harus dipenuhi.

Akibat dari kesalahan pencatatan ini adalah kesalahan dalam perhitungan rasio keuangan, terutama dalam rasio likuiditas dan solvabilitas, yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjangnya. Jika pinjaman dicatat sebagai hibah atau modal, rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas atau rasio likuiditas menjadi terdistorsi dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan pengelola koperasi dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki persepsi yang salah tentang kapasitas koperasi dalam menghadapi risiko keuangan dan memenuhi kewajibannya. Lebih jauh lagi, ketidakakuratan pencatatan liabilitas ini dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan yang salah dalam perencanaan keuangan koperasi. Sebagai contoh, jika pengurus koperasi tidak menyadari besar kewajiban yang sebenarnya karena pencatatan yang keliru, mereka mungkin akan lebih mudah mengambil keputusan untuk menambah pinjaman atau membuat investasi yang tidak sesuai dengan kapasitas keuangan koperasi. Secara keseluruhan, pencatatan liabilitas yang tidak tepat ini memperburuk transparansi keuangan koperasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan risiko fiskal yang lebih besar bagi desa. Dana Desa yang digunakan sebagai jaminan pinjaman bisa digunakan untuk menutupi utang yang tidak tercatat secara benar, sehingga mengurangi anggaran untuk program pembangunan lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, perbaikan dalam pencatatan liabilitas dan pelaksanaan pengawasan keuangan yang lebih ketat menjadi sangat mendesak untuk mencegah terjadinya distorsi keuangan yang berpotensi merugikan koperasi dan ekonomi desa secara keseluruhan (Robert, Frey, & Sisodia, 2021).

Moral Hazard dan Pengabaian Prinsip Kehati-hatian

Salah satu masalah signifikan yang dihadapi oleh koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) adalah munculnya moral hazard yang dapat merusak pengelolaan keuangan koperasi. Moral hazard merujuk pada situasi di mana pihak yang menerima manfaat dari suatu program atau kebijakan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas risikonya, sehingga mereka kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan (Kaicer et al., 2024). Dalam konteks Kopdes MP, moral hazard muncul karena sebagian besar pinjaman yang diberikan oleh koperasi dijamin oleh pemerintah, khususnya melalui Dana Desa yang digunakan sebagai penjamin pinjaman. Dengan adanya jaminan tersebut, baik pengurus koperasi maupun anggota merasa terlindungi dari konsekuensi kegagalan dalam mengembalikan pinjaman.

Pemberian pinjaman tanpa mempertimbangkan resiko gagal bayar yang memadai mengarah pada perilaku yang tidak hati-hati, baik dari pengurus koperasi maupun anggota yang menerima pinjaman. Pengurus koperasi, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana, mungkin merasa kurang tertekan untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan koperasi, karena merasa bahwa segala kegagalan dalam pengelolaan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Dana Desa. Begitu juga dengan anggota koperasi yang merasa bahwa mereka tidak perlu terlalu memperhatikan kemampuan membayar pinjaman karena pemerintah menjamin kewajiban mereka. Fenomena ini mengarah pada pengabaian prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan koperasi. Dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik, prinsip kehati-hatian mengharuskan pengurus untuk mengantisipasi potensi kerugian dan menghindari pengambilan keputusan yang dapat merugikan pihak lain, terutama dalam hal pemberian pinjaman. Namun, dalam prakteknya, pengabaian prinsip ini menyebabkan risiko gagal bayar yang tinggi, yang tidak

dicatat dengan benar, dan tidak ada pencadangan kerugian untuk menanggulangi kerugian yang mungkin terjadi (Magali, 2013).

Secara lebih luas, moral hazard ini tidak hanya merugikan koperasi itu sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada keberlanjutan Dana Desa yang digunakan sebagai jaminan (Udry, 1990). Ketika koperasi gagal memenuhi kewajibannya, Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program-program lain di desa menjadi tergerus untuk menutupi utang koperasi. Hal ini memperburuk kondisi fiskal desa, yang seharusnya mendukung kemajuan ekonomi desa, malah terhambat akibat pengelolaan yang tidak hati-hati. Dalam jangka panjang, moral hazard dan pengabaian prinsip kehati-hatian ini berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar, baik bagi koperasi maupun masyarakat desa secara keseluruhan (Kaicer et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan sistem pengawasan dan kontrol yang ketat, baik melalui audit internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa pinjaman dan dana yang disalurkan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang sehat.

Implikasi Fiskal terhadap Desa dan Negara

Penerapan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), yang mengandalkan pinjaman mikro untuk pengembangan ekonomi desa, memiliki implikasi fiskal yang signifikan, baik di tingkat desa maupun negara. Meskipun tujuannya untuk memberdayakan ekonomi desa, kurangnya pengelolaan yang tepat dalam hal akuntansi dan pengelolaan pinjaman dapat menyebabkan distorsi fiskal yang berdampak jauh lebih luas. Salah satu implikasi utama adalah alokasi Dana Desa yang dialihkan untuk menutupi kewajiban utang koperasi, yang pada akhirnya mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan desa lainnya. Di tingkat desa, banyak koperasi Merah Putih yang mengalami kesulitan dalam melunasi cicilan pinjaman yang telah diterima. Ketika koperasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program sosial di desa terpaksa digunakan untuk menutupi cicilan utang. Hal ini menyebabkan pengurangan dana yang tersedia untuk program pembangunan desa yang vital, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.

Di sisi lain, pada tingkat negara, kegagalan koperasi untuk mengelola utangnya dengan baik dan ketergantungan pada Dana Desa sebagai jaminan memiliki dampak ekonomi makro yang lebih luas (Udry, 1990). Program ini berpotensi menyebabkan kerugian negara yang besar, karena ketergantungan pada Dana Desa sebagai jaminan dapat menyebabkan peningkatan utang pemerintah yang pada gilirannya memperburuk defisit anggaran negara. Jika pinjaman koperasi yang dijamin oleh Dana Desa tidak dapat dibayar kembali, maka negara harus menanggung beban tambahan yang dapat berisiko memperburuk ketahanan fiskal negara. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa risiko gagal bayar koperasi Merah Putih dapat mencapai angka yang sangat besar, yang jika tidak ditangani dengan hati-hati, dapat menyebabkan penurunan PDB nasional. Analisis lebih lanjut oleh beberapa lembaga riset memperkirakan bahwa kegagalan dalam pengelolaan koperasi bisa menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp 9,85 triliun dan hilangnya lebih dari 824.000 lapangan kerja di sektor desa (Ginting, 2023). Ini menunjukkan bahwa potensi kerugian fiskal tidak hanya terbatas pada tingkat desa, tetapi dapat menyebar hingga ke tingkat nasional.

Distorsi fiskal ini juga menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya di antara sektor-sektor penting. Jika dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dialihkan untuk membayar utang koperasi, maka kualitas pelayanan publik di desa bisa menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan antara wilayah kota dan desa dalam hal akses terhadap layanan dasar yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengurangi implikasi fiskal yang timbul akibat kegagalan dalam pengelolaan koperasi, dibutuhkan reformasi mendalam dalam sistem pengawasan, audit, dan pencatatan akuntansi pada program Kopdes MP. Diperlukan kebijakan yang memperkuat pengelolaan dana desa, memastikan keberlanjutan program koperasi tanpa mengganggu pembangunan desa, serta mengurangi ketergantungan pada jaminan Dana Desa. Keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pengelolaan risiko yang efektif dalam koperasi desa (Comilla Model, 1979).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), khususnya terkait dengan akuntansi kredit dan pencatatan liabilitas. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan koperasi, yang pada gilirannya mengarah pada risiko fiskal yang signifikan bagi desa (Siwale & Godfroid, 2022). Praktik akuntansi yang buruk, terutama dalam hal pencatatan piutang dan pinjaman, berpotensi menimbulkan moral hazard dan tingkat default (NPL) yang tinggi (Durango-Gutiérrez et al., 2023). Tanpa adanya cadangan kerugian piutang, koperasi tidak dapat mencatat beban kerugian yang sebenarnya, yang menyebabkan nilai piutang menjadi overstated dan laba yang tercatat menjadi tidak realistis. Selain itu, ketidaktepatan dalam pencatatan pinjaman, di mana pinjaman dicatat sebagai pendapatan atau hibah daripada utang, menyebabkan distorsi pada neraca koperasi, yang mengaburkan kewajiban keuangan yang sebenarnya.

Lebih jauh lagi, distorsi dalam laporan keuangan ini dapat mempengaruhi kegagalan fiskal desa, di mana Dana Desa digunakan untuk menutupi pinjaman koperasi yang tidak dapat dibayar kembali (Siwale & Godfroid, 2022). Hal ini mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, serta menurunkan efektivitas alokasi dana untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan koperasi harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Reformulasi dalam pencatatan keuangan dan penguatan audit independen secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi dengan baik tanpa membebani keuangan desa. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pelatihan akuntansi yang lebih baik bagi pengurus koperasi dan penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih modern, agar masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir di masa depan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, koperasi desa disarankan untuk segera melakukan reformulasi sistem pencatatan keuangan dengan menerapkan SAK ETAP secara konsisten, termasuk pembentukan cadangan kerugian piutang dan pencatatan pinjaman sebagai liabilitas secara akurat. Peningkatan literasi dan kompetensi akuntansi bagi pengurus koperasi, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang terstandar, menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui audit independen berkala dan memperjelas regulasi terkait penggunaan Dana Desa sebagai penjamin kredit agar tidak menimbulkan risiko fiskal berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris kuantitatif atau studi komparatif lintas daerah guna mengukur secara lebih akurat dampak finansial dan fiskal program Kopdes MP terhadap kinerja koperasi dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Durango-Gutiérrez, E., et al. (2024). Microcredit Pricing Model for Microfinance Institutions under Basel III Banking Regulations. *International Journal of Financial Studies*. 12 (88). <https://www.mdpi.com/2227-7072/12/3/88>
- Ginting, A. H. (2023). Village Government's Risk Management and Village Fund Governance. *Sustainability*, 15(24), Article 16706. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/24/16706> ([MDPI][5])
- Hasanudin, A., Winanti, A., & Meliala, A. J. (2025). Legal certainty of financing of Merah Putih village cooperatives: Institutional analysis between cooperative independence and state intervention. *MICJO Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.1145>
- Huppi, M. (1990). The role of groups and credit cooperatives in rural lending. World Bank Research Observer. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/770010JRN0WBRO0Box0377291B00PUBLIC0.pdf> ([World Bank][3])
- Kaicer, M., Oudgou, M., Kaddar, A., & Arbi, A. (2024). The dynamic game of risk default in microcredit. *Journal of Algorithms & Computational Technology*. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17483026241270624>
- Lee, J.-H., Jusup, M., Podobnik, B., & Iwasa, Y. (2015). Agent-based mapping of credit risk for sustainable microfinance 9 (5). arXiv. <https://arxiv.org/abs/1504.05737>
- López-Sánchez, P., et al. (2021). Delving into the determinants of default risk in savings and credit cooperatives. *Frontiers in Public Health*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582241/> ([PubMed Central][4])
- Magali, J. J. (2013). The Influence of Rural Savings and Credits Cooperatives Societies (SACCOS) Variables on Loans Default Risks. *Research Journal of Finance and Accounting*. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/9503>
- Munthe, H., Bayu Wulandari, Namira Ufrida Rahmi, Thomas Firdaus Hutahaean, Dianty Putri Purba, Jessi Charina Sembiring, ... Ribka Sari Butar-Butar. (2025). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Merah Putih Desa Tiga Juhar Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu Deli Serdang. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 15(2). <https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i2.3914>
- Robert, F. C., Frey, L. M., & Sisodia, G. S. (2021). Village development framework through self-help-group entrepreneurship, microcredit, and anchor customers in solar microgrids for cooperative sustainable rural societies. *Journal of Rural Studies*, 88, 432–440. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.013>
- Salaton, E. E., & Gudda, P. (2020). Effect of Loan Default Rate on Financial Performance of Savings and Credit Cooperative Societies in Narok County, Kenya. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 65–75. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i2/7345> ([ResearchGate][2])
- Siwale, J., & Godfroid, C. (2022). Digitising microfinance: on the route to losing the traditional 'human face' of microfinance institutions. *Oxford Development Studies*, 50(2), 177–191. <https://doi.org/10.1080/13600818.2021.1998409>
- Tuli, H., & Mahmud, M. (2025). Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Merah Putih Berdasarkan Konsep Entitas di Desa Pentadio Barat. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 5(1), 11 - 20. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v5i1.119>



- Udry, C. (1990). Credit Markets in Northern Nigeria: Credit as Insurance in a Rural Economy. *The World Bank Economic Review*. 4(3), 251-269
- Xin Song, Li Li, & Xiao, L. (2017). Review of research on credit risk management for rural credit cooperatives. *Journal of Risk Analysis and Crisis Response*, 7(1). <https://www.jracr.com/index.php/jracr/article/view/205>
- Zheng, Y., Lou, J., Mei, L., & Lin, Y. (2023). Research on Digital Credit Behavior of Farmers' Cooperatives—A Grounded Theory Analysis Based on the “6C” Family Model. *Agriculture*, 13(8), 1597. <https://doi.org/10.3390/agriculture13081597>